



41.147 Warga Masih Miskin

● **Pendataan KMS Dijadwalkan Selesai Akhir Tahun Ini**

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta kembali melaksanakan Pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial atau Keluarga Menuju Sejahtera (KMS). Pendataan bertujuan menetapkan daftar pemegang KMS Kota Yogyakarta untuk tahun 2016 mendatang.

Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Seha Tri Maryatun, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan beberapa tahapan pendataan baik melalui uji publik pertama sampai uji publik kedua.

Tri menyebut, pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota

Yogyakarta dilaksanakan selama setahun, mulai bulan Maret 2015. Ia menargetkan, bulan Desember 2015 ini pendataan pemegang KMS telah selesai dilakukan, sehingga pendistribusian dapat segera dilaksanakan pada tahun 2016 mendatang. Merujuk data Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

■ Bersambung Ke Hal 14

DATA PENDUDUK

Tahun 2014: 413.936 jiwa
Pemegang KMS: 20.481 KK atau 84.899 jiwa
Fakir miskin: 299 KK, 759 jiwa
Keluarga miskin: 9.365 KK
Rentan miskin: 29.912 jiwa
10.907 KK
34.028 jiwa

Tahun 2015
Pemegang KMS 2015: 18.881 KK atau 60.230 jiwa
Fakir miskin sebanyak 31 KK atau 101 jiwa
Keluarga miskin: 5.989 KK
18.992 jiwa
Rentan miskin: 12.867 KK, 41.147 jiwa

Aspek sosial
• Keluarga tak mampu mengikuti aktivitas kegiatan lingkungan karena alasan ekonomi

PARAMETER MISKIN

Aspek pendapatan

- Suami istri yang tak bekerja
- Pendapatan rata-rata anggota keluarga di bawah Rp 400.000 per bulan
- Status kepemilikan bangunan atau tempat tinggal bukan milik sendiri
- Tagihan listrik kurang dari Rp 50.000 per bulan

Aspek papan

- Luas tempat tinggal kurang dari lima meter persegi
- Dinding terluas tempat tinggal berbahan bambu/kayu/bahan berkualitas rendah

Aspek pangan

- Keluarga tak mampu memberi makan anggota keluarga tiga kali sehari
- Keluarga tak mampu membeli dan menyediakan lauk daging/telur/ayam/ikan atau susu dua kali seminggu

Aspek sandang

- Keluarga hanya membelikan pakaian baru bagi anggota keluarga maksimal sekali setahun

Aspek kesehatan

- Keluarga tak mampu membayar biaya tindakan di puskesmas
- Sumber air minum bukan dari PAM, tempat BAB bukan di MCK

Aspek pendidikan

- Pendidikan kepala keluarga maksimal lulus SMP
- Terdapat tanggungan keluarga sekolah SLTA ke bawah
- Terdapat anak usia sekolah yang DO/putus sekolah

GRAFIS/SULUH PRASETYA

41.147 Warga

Sambungan Hal 13

tahun 2013, jumlah pemegang KMS pada tahun 2014 adalah sebanyak 20.481 KK atau 64.699 jiwa; dengan rincian keluarga fakir miskin sebanyak 209 KK, 759 jiwa, sedangkan keluarga miskin, 9.365 KK, 29.912 jiwa. Terakhir, rentan miskin sebanyak 10.907 KK, 34.028 jiwa.

Sedangkan jumlah pemegang KMS pada tahun 2015 ini adalah sebanyak 18.881 KK, 60.230 jiwa; dengan rincian keluarga fakir miskin sebanyak 31 KK atau 101 jiwa, sedangkan keluarga miskin, 5.989 KK, 18.992 jiwa. Sedangkan rentan miskin sebanyak 12.867 KK, 41.147 jiwa.

"Yang paling banyak adalah rentan miskin. Jika dibandingkan dengan data BPS, banyak data dari Pemkot Yogyakarta menyasar kepada keluarga rentan miskin. Kelurahan dengan jumlah KMS tertinggi dan terendah masing-masing adalah kelurahan Pringgokusuman, Gedongtengen dan Kelurahan Kotabaru," tutur Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Seha Tri Maryatun, Jumat (27/11).

Uji publik

Dia menambahkan, uji publik pertama dimulai bulan Maret-Juni dengan tahap awal komunikasi dan sosialisasi di tingkat RT/RW/Kelurahan/Kecamatan mengenai program pendataan KMS. Selanjutnya dilaksanakan penyeleksi-an petugas pendata yang berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk melakukan pencermatan data pemegang KMS tahun berjalan dan data KMS usulan.

Pendataan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2015 dengan pendataan terhadap semua data dan menindaklanjuti laporan atas adanya ketidaktepatan data. Inventarisasi hasil konfirmasi data dari RT/RW/Kelurahan/Kecamatan, secara tatap muka kepada ketua pengurus RT/RW. Selanjutnya, dilakukan verifikasi atas data hasil konfirmasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.

Uji publik kedua dilaksanakan pada November 2015, dengan menampung pendapat dari RT/RW/Publik/Masyarakat. Pada tahap ini, usulan RW ditampung, rekap sebelum

uji jumlah KMS usulan RW berkisar 4.470 KK, setelah dilaksanakan uji bertambah menjadi 7.275 KK.

"Data yang dihasilkan dari uji publik pertama sebagai data untuk verifikasi di lapangan pada uji publik dua melalui verifikasi cepat oleh petugas pendata KMS. Uji publik kedua diperkirakan selesai pada 7 Desember 2015. Kami tengah menunggu masukan RT RW untuk disampaikan ke Kelurahan. Kemudian Verifikasi cepat di Dinsosnakertrans. Harapannya, Desember sudah selesai," tambah Tri.

Sedangkan parameter yang digunakan mengacu pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 244/KEP/2012 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial. Setidaknya terdapat tujuh aspek dan 17 parameter untuk menentukan keluarga sasaran dinyatakan sebagai fakir miskin, miskin dan rentan miskin.

"Parameter ini selalu disempurnakan, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Penyusunannya pun melibatkan banyak pihak, baik dari Bappeda, sampai dari

akademisi UGM," tutur Tri.

Aktif mendata

Lurah Rejowinangun, Retnaningtyas, menuturkan, wilayahnya telah secara aktif melaksanakan pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk Keluarga Menuju Sejahtera (KMS). Pihaknya mengerahkan lembaga lain, PSM, BSM, TKPK dan lembaga sosial lainnya untuk melakukan pencermatan data KMS.

"Kami sudah melibatkan berbagai banyak pihak seperti PSM, BSM, TKPK, untuk melaksanakan verifikasi dan pencermatan data KMS ini, agar data dapat tepat sasaran," ujar Retnaningtyas, Jumat (27/11).

Retna melanjutkan, ia mencatat sebanyak kurang lebih 419 KK di Kelurahan Rejowinangun yang terdaftar pada program KMS. Jumlah ini dirasa akan berubah setelah dilakukan verifikasi pada uji publik kedua.

"Data tersebut pasti berubah, karena banyak yang semisal minggial, atau pindah. Ada juga masyarakat setelah setahun ada peningkatan kesejahteraan, sehingga tak dimasukkan lagi ke KMS," tuturnya. (rfk)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005